

Pengaruh Kompetisi Politik dan Kekuatan Politik terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Fadila Sri Mulyati^{1*}, Deviani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: fadilasrimulyati01@gmail.com

Tanggal Masuk:

9 Mei 2023

Tanggal Revisi:

2 September 2023

Tanggal Diterima:

4 September 2023

Keywords: *Political Factors; Transparency; Political Competition; Political Strength.*

How to cite (APA 6th style)

Mulyati, F. S., & Deviani (2023). Pengaruh Kompetisi Politik dan Kekuatan Politik terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (3), 1255-1271.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.875>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to determine the effect of political competition and political strength on the transparency of district/city regional financial management on the island of Sumatra. This type of research is quantitative research, the type of data using secondary data. The population in this study were 154 districts/cities on the island of Sumatra with a total sample of 125 samples for one year of observation namely 2021. The data analysis technique used in this study was multiple regression analysis. The results of this study are that political strength has a significant negative effect on the transparency of regional/cities on the island of Sumatra in 2021. However, the political competition variable has no effect on the transparency of regional financial management in districts/cities on the island of Sumatra in 2021.

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik harus mematuhi cita-cita tata pemerintahan yang baik tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Araujo dan Tejedro-Romero (2016), gagasan transparansi mencakup berbagai faktor, termasuk ketersediaan informasi (*supply side of transparency*), aksesibilitas, dan penggunaan oleh masyarakat umum dan pihak berkepentingan lainnya. Kapasitas warga negara dan aktor eksternal lainnya untuk melacak dan mengevaluasi kinerja internal dan kinerja organisasi publik bergantung pada ketersediaan informasi dari organisasi pemerintah (Meijer, 2013; Grimmelikhuisen 2012). Menurut Mardiasmo (2004), dalam konteks pemerintah daerah (pemda), transparansi mengacu pada keikutsertaan (keterbukaan) pemerintah dalam memberikan informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Agar DPRD dan masyarakat umum mengetahui dan memantau pelaksanaan kebijakan keuangan daerah oleh pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah juga harus transparan.

Gerakan transparansi telah didorong oleh TIK (Ding, 2009; Garrido Rodriguez et al. 2019; Araujo & Tejedo Romero, 2020), situs web pemerintah (Brandsma et al., 2008) dan perubahan peraturan (Araujo & Tejedo Romero, 2016); Pina & Avekkaneda, 2019). Praktek transparansi tersebut dibingkai dalam dua jenis transparansi pemerintah yaitu reaktif dan proaktif. Transparansi reaktif berkaitan dengan permintaan informasi oleh warga (Brandsma et al. 2008). Menurut Michener & Bersch (2013) transparansi reaktif disebut juga dengan transparansi pasif yang berkaitan dengan peraturan atau undang-undang kebebasan informasi. Pada sisi lain, transparansi proaktif merupakan varian *e-government* terbaru melalui informasi aktif di situs web (Garrido Rodriguez et al. 2019). Trasparansi melalui situs web menciptakan informasi yang tersedia untuk semua warga negara secara sukarela atau wajib, tanpa ada permintaan yang diajukan (Ingram, 2017; Michener & Bersch, 2013).

Transparansi keuangan di Indonesia pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa salah satu upaya khusus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi dalam konteks pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 diinstruksikan untuk membuat konten atau portal Transparansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (TPAD) pada *website* pemerintah daerah yang berisi berbagai dokumen terkait anggaran dan laporan keuangan. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan transparansi semakin gencar, hal ini dapat diketahui dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga serta pemda untuk mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada poin 32 lampiran Inpres No. 7 Tahun 2015 menggalakan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, gubernur, bupati, walikota agar meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah dengan cara menyediakan informasi pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel berupa 12 item informasi pada masing-masing *website* resmi pemda. Hal tersebut sangat penting karena pengelolaan keuangan daerah merupakan subsitem dari sistem pengelolaan keuangan negara serta elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah). Menurut Syamsul (2020) kebijakan Inpres No. 7 Tahun 2015 poin 32 dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi mereka.

Transparansi memiliki dampak positif dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Berdasarkan penelitian Albalate (2013) menyatakan transparansi menjadi alat yang diperlukan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Kurangnya transparansi sering dikaitkan dengan korupsi pemerintah. Sharman & Chaikin (2009) menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah keuangan yang paling penting di sebagian besar negara berkembang, dan mungkin merupakan hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi. Hood (2001); Fozzard & Foster (2001) menjelaskan bahwa transparansi pemerintah merupakan isu penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Tanzi (1998) berpendapat bahwa kurangnya transparansi menciptakan lahan subur untuk korupsi.

Pada prinsipnya transparansi informasi keuangan adalah salah satu parameter utama yang difokuskan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi agar dapat mencapai pemerintah yang baik (*good governance*). Namun demikian, masih terdapat pemerintah daerah melakukan tindakan korupsi. Hasil penelitian *Transparency International Indonesia* (TII) tentang indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan bahwa Tahun 2021 IPK Indonesia berada di titik 38 dan ranking 96 dari 180 negara, artinya negara Indonesia masih

memiliki skor di bawah 50 yang mengindikasikan negara tersebut memiliki korupsi serius. Beberapa negara yang punya skor dan ranking yang sama dengan Indonesia adalah Argentina, Brazil, Turki, Serbia dan Lesotho (Tempo. co, 25 Januari 2022). Sementara itu, melalui hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021), terdapat 179 kasus korupsi di tingkat kabupaten/kota Indonesia (ICW, 2022).

Berdasarkan data diatas masih terdapat pemerintah daerah melakukan tindakan korupsi seperti di Sumatra yang pejabatnya menjadi langganan kasus korupsi. Dikutip dari databoks.katadata.co.id (07 Maret 2022) menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2021 kasus tindak pidana korupsi di Pulau Sumatera terjadi di wilayah Sumatera Selatan dengan kasus 30 kasus, Sumatra Utara 5 kasus, Riau & Kepulauan Riau 4 kasus. Temuan tersebut, juga mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah di Pulau Sumatra masih rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Suwarsih & Ritonga (2017) menemukan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Agustin & Arza (2020) melakukan penelitian transparansi pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat menemukan hasil bahwa masih rendahnya jumlah pemerintah kabupaten/kota yang secara konsisten melakukan transparansi. Jessica & Suhartono (2020) menemukan indeks transparansi pada Kab/Kota di Pulau Sumatra tahun anggaran 2018 sebesar 10,2%. Anisa (2021) di Pulau Sumatra tahun anggaran 2019 menemukan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 15,2%. Penelitian Sandunaez & Syafei (2022) menghitung indeks transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah di provinsi Jambi menunjukkan angka 37,50% dan 12,50% untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 yang kemudian jika indeks tersebut diperingkat dan dikategorikan maka masuk dalam tingkat keterbukaan anggaran tidak cukup transparan.

Fenomena dan data di atas mengindikasikan bahwa tingkat transparansi Pulau Sumatra masih rendah sehingga menjadi isu yang cukup penting untuk diperbaiki, mengingat adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 mengenai media *website* yang memudahkan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi secara transparansi. Kemudian di pertegas dengan Inpres nomor 7 Tahun 2015 yang diterbitkan pada enam tahun yang lalu tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti transparansi pemerintah daerah melalui *website* pemda, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya agar selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi untuk mewujudkan transparansi pemerintah daerah yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan pemerintah daerah telah menjadi fokus dalam beberapa penelitian terdahulu baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan Garcia dan Carcia (2010) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* Spanyol. Hasil penelitian Garcia dan Garcia (2010) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi adalah ukuran pemda, *capital investment*, *press visibility*, dan kompetisi politik. Penelitian Guillamon et al. (2011) di Spanyol mengidentifikasi faktor politik dan ekonomi terkait dengan transparansi dalam jangka panjang, selain itu analisis evaluasinya mengamati bahwa publikasi informasi menjadi salah satu rangsangan terbesar bagi pemerintah kota untuk meningkatkan tingkat informasi publik mereka. Penelitian Tejedro Romero & de Araujo (2015) menyimpulkan variasi tingkat transparansi terkait dengan faktor politik. Penelitian Araujo & Tejedro Romero (2016) menemukan kompetisi politik berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pemerintah daerah. Penelitian Benito et al. (2021) menemukan kekuatan politik berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan informasi keuangan pada website resmi dilakukan oleh Puspita (2010) menemukan bahwa PAD, DAK, DAU, dan Ukuran Pemda mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi di website pemda. Martani et al (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan signifikan pada website resmi pemda. Penelitian Rahim & Martani (2016) menggunakan tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik pemda (usia daerah, kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah, jenis daerah, ukuran daerah), karakteristik demografi (tingkat pengangguran, tingkat kesejahteraan daerah). Hasil penelitian Rahim & Martani (2016) menunjukkan bahwa variabel tingkat akses internet, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, serta kesejahteraan daerah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dan tidak ditemukan pengaruh variabel usia pemda, kemandirian daerah, pengangguran dan kompetisi politik terhadap transparansi keuangan daerah. Jessica & Suhartono (2020) di Pulau Sumatra menemukan hasil penelitian Indeks Pembangunan Manusia dan Opini Audit, Opini Audit dan Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap transparansi.

Literatur diatas telah menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi transparansi. Faktor yang paling dominan dalam menentukan transparansi adalah faktor politik. Namun literatur mengenai pengaruh faktor politik terhadap transparansi di Indonesia dengan konteks pemerintah daerah saat ini masih jarang. Untuk itu penelitian ini dilakukan kembali dengan populasi penelitian yang berbeda yaitu pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatra. Selain itu keterbatasan dari penelitian terdahulu berada di kategori pengukuran transparansinya. Sejumlah literatur, seperti Garcia dan Garcia (2010); Guillamon et al. (2011); Tejado Romero & de Araujo (2015); Benito et al. (2021) mengukur transparansi berdasarkan ketersediaan item informasi saja tanpa melihat aksesibilitas dan ketepatan waktu pengungkapan. Aksesibilitas berarti menunjukkan data dan informasi yang tersedia dalam website pemda dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat, sedangkan ketepatan waktu adalah rentang waktu yang ditetapkan (Huwae, 2016). Padahal, esensi sebenarnya atau sejatinya dari sebuah informasi terletak pada ketepatan waktu pengungkapan (publikasi). Armstrong (2005); Chalid Pheni (2005); dan Fung (2014) menyatakan bahwa ketepatan waktu adalah salah satu pilar utama dari transparansi. Hal ini dikarenakan informasi yang disajikan tepat waktu, tentunya akan memiliki nilai sempurna, lebih bermanfaat, dan lebih berpengaruh bagi pengambil keputusan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan pengembangan atribut riset yang lebih baik dalam hal literatur serta data, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan maupun penguat referensi terkait pengaruh faktor politik terhadap transparansi pada pemerintah daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan Adiputra (2018); Tejado & de Araujo (2015) menjelaskan bahwa faktor politik merupakan salah satu faktor yang berperan terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah. Faktor politik adalah kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi, yang dimana dalam hal ini faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di dalam struktur pemerintahan yang nantinya dapat memudahkan dan menyulitkan transparansi pelaporan keuangan daerah (Fardian ,2014; Di Maggio & Powell, 1983). Pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai literatur transparansi menunjukkan bahwa tekanan untuk menjadi lebih transparansi bagi pemerintah daerah diakibatkan oleh persaingan politik terkait dengan pengawasan kegiatan partai. Berliner & Erlich (2015) menyatakan kompetisi politik dianggap berperan penting dalam mengadopsi reformasi institusi dengan melakukan peningkatan akses informasi.

Menurut Barardi (2015) kompetisi politik merupakan suatu proses kompleks dalam demokrasi dimana adanya persaingan politik untuk mendapatkan kekuasaan politik berupa hak membentuk dan mengontrol arah kebijakan publik. Persentase kemenangan yang tinggi dalam kompetisi politik menunjukkan bahwa calon terpilih telah memenuhi keinginan

masyarakat yang lebih besar dari calon lainnya. Artinya calon terpilih tersebut tidak mengalami kompetisi politik yang tinggi atau ketat. Sebaliknya apabila persentase kemenangan yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan lawan lainnya, maka kompetisi antara calon terpilih lebih tinggi atau ketat karena keinginan masyarakat terhadap masing-masing calon tidak terlalu berbeda maka menyebabkan kompetisi politik menjadi lebih tinggi. Pemerintah daerah yang memiliki kompetisi politik yang tinggi memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat, lawan kepala daerah saat pemilukada dan partai politik yang tidak menggusung kepala daerah sehingga semakin sedikit ruang untuk pemerintah dalam menyembunyikan kegiatan pemerintahan. Hal ini akan menjadi pendorong adanya keterbukaan informasi yang besar juga (Navarro-Galera et al, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Garcia-Garcia, 2010; Araujo & Tejedo- Romero, 2016; Tavares & de Cruz, 2020) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kompetisi politik dengan transparansi pemerintah daerah. Sebagian besar dapat dijelaskan oleh tekanan dari kelompok oposisi yang memaksa kepala daerah untuk mengungkapkan informasi tertentu. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Wau & Ratmono, 2015; Rahim & Martani, 2016; Tejedo-Romero & Araujo, 2020) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetisi politik dengan transparansi pemerintah.

Penelitian Tejedo & de Araujo (2015) dan Benito et al. (2021) menjelaskan kekuatan politik berpengaruh terhadap pengungkapan informasi. Kekuatan politik yang dimiliki oleh pemimpin dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dan praktik pengungkapan informasi, kekuatan yang berbeda biasanya juga mengusulkan bentuk kepemimpinan yang berbeda (Alt et al. 2006). Kekuatan politik yang dimiliki oleh seorang pemimpin daerah tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila di Indonesia memiliki dua peranan penting yakni sebagai pandangan hidup, atau sebagai pedoman hidup, atau sebagai pedoman tingkah laku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan sistem partai politik di Eropa yang terbagi menjadi kubu partai sayap kanan (partai rakyat/konservatif) dan kubu partai sayap kiri (partai sosialis/progresif), sistem partai yang digunakan di Indonesia adalah sistem multipartai. Sistem multipartai ini menyebabkan tidak adanya partai yang mempunyai suara mayoritas di Indonesia sehingga partai tersebut membentuk suatu koalisi dan oposisi. Koalisi merupakan bentuk kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Sedangkan oposisi adalah partai penentang dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan yang berkuasa. Penggabungan partai politik tersebut biasanya atas dasar tujuan politik dan pandangan politik yang sama sehingga dalam pengusulan calon kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjadi peserta pemilihan ketika calon kepala daerah tersebut mendaftarkan diri dan memenuhi pengajuan dirinya sebagai calon independen dalam pemilihan kepala daerah atau diusulkan oleh satu partai, atau diusulkan oleh beberapa gabungan partai politik sehingga 2 sampai 3 partai dapat mendukung satu calon yang sama.

Koalisi tersebut dirasakan tidak hanya di level pemerintah pusat, melainkan sampai ke tiap-tiap daerah di Indonesia. Dengan adanya kesamaan kekuatan politik dalam berkoalisi mendukung pemerintahan yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mengindikasikan keselarasan sistem nilai yang ada antara partai yang tergabung dalam koalisi dengan pemerintah yang berkuasa. Kondisi tersebut diduga dapat menurunkan usaha komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi secara lebih transparan kepada masyarakat karena legitimasi akan terjaga dengan adanya kesamaan keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai yang telah terwujud dan dipahami bersama.

Penelitian Tejedo & de Araujo (2015) juga menjelaskan bahwa kekuatan mayoritas berdampak kepada penurunan transparansi. Kotamadya yang dipimpin oleh kekuatan mayoritas berada dalam posisi nyaman dan tidak rentang untuk mengungkapkan informasi

(Albalate, 2013). Posisi mayoritas berdampak kepada pemerintah dalam memutuskan kapan dan informasi mana yang akan diungkapkan sehingga tidak memerlukan dukungan dari pihak lain (Tejedo & de Araujo 2015). Berbeda dengan walikota yang memiliki kekuatan fragmentasi yang menghadapi lebih banyak situasi keterampilan negosiasi dan kemampuan untuk berkompromi diperlukan untuk menyekinkan anggota politik lain dalam mendukung kebijakan yang diusulkan oleh walikota (Tevares & da Cruz, 2020). Namun demikian, Benito et al, (2021) menemukan kekuatan politik mayoritas berpengaruh positif terhadap transparansi, bahwa semakin tinggi kekuatan politik tingkat transparansi juga semakin tinggi meskipun petahana berada di partai mayoritas akan tetap mengungkapkan lebih lengkap informasi mengenai kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dan pihak oposisi. Garcia Sanchez *et al* (2013) dan Tejedo Romero & Araujo (2020) tidak menemukan bahwa kekuatan politik berpengaruh terhadap transparansi. Ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan daerah pada website pemda semakin menambah perdebatan diantara praktisi, sehingga penelitian mengenai transparansi keuangan daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Tejedo-Romero & Araujo (2015) dan Araujo & Tejedo Romero (2016) menggunakan dua variabel independen yaitu kompetisi politik (Araujo & Tejedo Romero, 2016) dan kekuatan politik (Tejedo-Romero & Araujo, 2015). Variabel kompetisi politik dan kekuatan politik dipilih dengan alasan masih terdapat perbedaan temuan dari penelitian sebelumnya. Selain itu literatur mengenai pengaruh faktor politik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih sedikit. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan pengembangan atribut riset yang lebih baik dalam hal literatur serta data, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan maupun penguatan referensi terkait pengaruh faktor politik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada indikator penelitian. Penelitian sebelumnya menilai ketersediaan transparansi kotamadya Portugis melalui website Transparency International Spain dengan indikator variabel biner nilai 1 jika informasi tersedia dan 0 sebaliknya. Sedangkan penelitian sekarang menilai indeks transparansi melalui tiga kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan berdasarkan Inpres No 7 Tahun 2015 berupa 12 indikator transparansi untuk tahun anggaran 2021 melalui website pemerintah Kabupaten/Kota Pulau Sumatra.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak (prinsipal) mendelegasikan atau memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pendelegasian terjadi ketika pihak prinsipal memilih pihak agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Lupia & Mc Cubbins, 2000). Di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latiah, 2010; Abdullah, 2012). Menurut Zimmerman (1977) hubungan keagenan dapat memunculkan adanya *agency problem* berupa asimetri informasi yang mendorong terjadinya konflik kepentingan. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen yang memegang informasi lebih lengkap akan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat, sehingga terkadang masyarakat menerima informasi tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Masyarakat yang bertindak sebagai pengawas pemerintah berhak memperoleh pelayanan dan mendapatkan informasi secara terbuka dari pemerintah daerah. Salah satu cara untuk meminimalisir konflik kepentingan

adalah pemerintah wajib untuk mempublikasikan informasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Transparansi

Transparansi adalah pengungkapan informasi yang relevan secara tepat waktu dan sistematis (Krah & Mertens, 2020). Dengan adanya prinsip transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi tentang pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Transparansi mengacu pada akses yang tidak terbatas oleh masyarakat untuk informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan pada keputusan dan kinerja di sektor publik (Armstrong, 2005)

Kompetisi Politik

Downs (1957) mengartikan kompetisi politik sebagai kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan suatu platform kebijakan yang layak dijalankan. Menurut Baraldi (2015) kompetisi politik merupakan suatu proses kompleks dalam demokrasi dimana adanya persaingan politik untuk mendapatkan kekuatan politik berupa hak membentuk dan mengontrol arah kebijakan publik.

Kekuatan Politik

Tejedo-Romero & de Araujo (2015) mengelompokkan kekuatan politik menjadi kekuatan mayoritas mutlak (kekuatan maksimum) dan fragmentasi maksimum. Di Indonesia sistem yang dianut adalah sistem multipartai sehingga tidak ada partai yang memiliki kekuatan mayoritas untuk itu dibentuk koalisi dan oposisi.

Hubungan Antara Kompetisi Politik Terhadap Transparansi

Kompetisi politik yang tinggi menjadi pendorong untuk meningkatkan transparansi. Sesuai dengan teori keagenan bahwa kompetisi politik berkaitan dengan motivasi dan kebijakan pemerintah daerah. Informasi yang dimiliki oleh kepala daerah lebih lengkap untuk itu kompetisi politik yang tinggi menjadikan kepala daerah dan pejabatnya dituntut untuk lebih transparan terhadap informasi yang dimilikinya. Tuntutan tersebut bertujuan agar kepala daerah tidak hanya memenuhi kepentingannya dan partai politik pendukungnya. Pelaksanaan pemerintahan tidak hanya diawasi oleh masyarakat, tetapi juga oleh lawan kepala daerah saat pemilukada maupun partai politik yang tidak mengusung kepala daerah terpilih. Penelitian (Garcia & Garcia, 2010; Garcia-Sanchez et al., 2013; Araujo & Tejedo-Romero, 2016a; Tevares & da Cruz, 2020) menemukan variabel kompetisi politik berpengaruh positif terhadap transparansi. Selain itu Alcaide Munos *et al.*, (2018) juga menemukan bahwa variabel kompetisi politik yang tinggi merupakan pendorong utama tingkat transparansi informasi pemerintah. Di Indonesia penelitian Trisnawati & Achmad (2014) juga menemukan pengaruh positif antara kompetisi politik dengan pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda. Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan Antara Kekuatan Politik Terhadap Transparansi

Kekuatan politik adalah latar belakang partai politik pemerintah daerah yang menjadi penopang dalam proses pilkada. Tejedo-Romero & Araujo (2015) mengelompokkan kekuatan politik menjadi dua yaitu kekuatan mayoritas mutlak (kekuatan maksimum) dan fragmentasi maksimum. Di Indonesia menggunakan sistem multi partai sehingga tidak terdapat suara mayoritas mutlak. Karena menganut sistem multi partai maka terbentuk koalisi

dan oposisi. Adanya kesamaan kekuatan politik dalam berkoalisi (bergabung) mendukung pemerintahan yang ada di tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan keselarasan sistem nilai yang ada antara partai yang bergabung dalam koalisi dengan pemerintah yang berkuasa. Kondisi tersebut diduga dapat menurunkan usaha komunikasi yang dilakukan kepala daerah karena legitimasi akan terjaga dengan adanya kesamaan keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai yang telah terwujud dan dipahami bersama.

Penelitian Albalate (2013) dan Tejedro-Romero & de Araujo (2015) menyatakan bahwa kekuatan politik berpengaruh negatif terhadap transparansi. Posisi mayoritas menjadikan pemerintah daerah dapat menyepelekan fungsi transparansi pelaporan keuangannya, dikarenakan pemerintah daerah tersebut berada di dalam lingkungan yang mendukungnya. Tejedro-Romero & de Araujo (2015) menemukan bahwa pemerintah daerah berada di kekuatan mayoritas memiliki kontrol yang lengkap atas keputusan politik dan informasi sehingga tidak memerlukan kesepakatan dengan pihak lain, dan menurut teori keagenan akan cenderung kurang transparansi. Albalate (2013) menemukan bahwa ketika pemerintah daerah menikmati kekuatan mayoritas maka kotamadya menjadi lebih buruk menghasilkan indeks transparansi. Caamano-Alegre (2013) menemukan kepala daerah yang memimpin Kotamadya dengan kekuatan mayoritas berada dalam posisi yang lebih nyaman dan rentan mengurangi informasi sehingga indeks transparansinya menurun. Kekuatan politik yang lebih kuat dan legitimasi yang tinggi berdampak kepada penurunan praktek transparansi keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Kekuatan politik berpengaruh negatif terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sampel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausatif sementara jenis data yang digunakan data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan sampel

No	Keterrangan	Jumlah
1.	Kabupaten dan Kota di Sumatra tahun 2021	154
2.	Website kabupaten dan kota tidak dapat diakses	(2)
3.	Kabupaten dan Kota tidak tersedia data TPKD	(27)
4.	Tidak tersedia data berupa kompetisi politik dan kekuatan politik	0
5.	Jumlah sampel	125

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dalam tahapan untuk mengukur transparansi dari masing-masing website resmi pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Pulau Sumatra tahun 2021. Data dan informasi tersebut merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban (Inpres no 7 tahun 2015). Data Kompetisi politik dan kekuatan politik diperoleh melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) <https://www.kpu.go.id>

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik dokumentasi dan survei sekunder. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan informasi masing-masing website pemerintah kabupaten/kota Pulau Sumatra serta data politik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) <https://www.kpu.go.id>. Sementara survei sekunder berupa angka, uraian, dan juga informasi yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi. Analisis didasarkan pada indikator atau dokumen yang ditentukan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Pengukuran variabel transparansi menggunakan instrumen rancangan Huwae (2016) yang telah diperbaiki oleh Ritonga & Syamsul (2016) dengan memasukkan perubahan aksesibilitas dan kemudahan waktu publikasi. Sehingga setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dievaluasi berdasarkan tiga kriteria utama yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu.

Variabel Independen

Kompetisi Politik (*Political Competition*)

Kompetisi politik diukur menggunakan nilai 1-persentase kemenangan dalam pemilihan kepala daerah terakhir setiap kabupaten/kota (Rahim & Martani, 2016).

Kekuatan Politik (*Political Strength*)

Mengacu pada penelitian Tejedro-Romero & de Araujo (2015) dan Albalate (2013) proksi kekuatan politik digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel dummy dimana 1 jika kepala daerah didukung salah satu dari tiga partai pertama pemenang pemilu legislatif pusat dan 0 sebaliknya.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS 25. Analisis tersebut digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen yaitu kekuatan politik dan kompetisi politik terhadap variabel dependen (transparansi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparency (Y)	125	4.17	66.67	15.2007	13.60683
Political Competition (X1)	125	0.0380	0.6990	0.497112	0.1368500
Political Strength (X2)	125	0	1	0.69	0.465
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Data Penelitian diolah menggunakan Software SPSS 25.0 tahun 2023

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan sampel penelitian (N) berjumlah 125 sampel. Nilai transparansi terendah (minimum) 4,17 nilai tertinggi (maximum) yaitu 66,67, nilai mean 15,2007 sedangkan Std. Deviation 13.60683. Untuk variabel kompetisi politik memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,497112 dengan Std. Deviation 0,1368500. Selain itu variabel kompetisi politik memiliki nilai minimum 0,0380 dan maximum 0,6990. Variabel kekuatan politik memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,69 dengan Std. Deviation 0,465. Selain itu, variabel kekuatan politik memiliki rentang minimum 0 yang menunjukkan bahwa kepala daerah tidak didukung oleh salah satu dari 3 partai pemenang pemilu legislatif. Nilai maximum variabel kekuatan politik adalah 1 yang berarti kepala daerah didukung oleh salah satu dari 3 partai pertama pemenang pemilu legislatif.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	11.94594301
Most Extreme Differences	Absolute	0.114
	Positive	0.114
	Negative	-0.073
Test Statistic		0.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.000 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		0.072
Point Probability		0.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pengujian normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai level signifikan lebih besar dari Alpha (0,05) yaitu 0,072 > 0,05 dengan demikian tahapan pengelolaan data selanjutnya dapat dilakukan.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* menunjukkan nilai > 0,010 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4
Uji Multikolonieritas

Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	Political Competition (X1)	0.988	1.012
	Political Strength (X2)	0.988	1.012

a. Dependent Variable: Transparency (Y)

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Heteroskedastisitas Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	0.223	0.081		2.738	0.007
Political Competition (X1)	0.236	0.142	0.149	1.664	0.099
Political Strength (X2)	-0.039	.0042	-0.084	-0.936	0.351

a. Dependent Variable: ABS

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig > 0,05 yaitu variabel kompetisi politik (Political Competitin) 0,099 > 0,05 dan kekuatan politik (Political Strength) 0,352 > 0,05. Maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala *heteroskedastisitas* dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Pada tabel 6 menjelaskan hasil uji koefisien determinasi dengan bilai R Square sebesar 0,229 artinya 22,9 % transparansi dapat dijelaskan oleh variabel kompetisi politik dan kekuatan politik. Sedangkan sisanya 77,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

Tabel 6
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.479 ^a	0.229		0.217

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7
Hasil Pengujian F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5262.582	2	2631.291	18.141	0.000 ^b
	Residual	17695.489	122	145.045		
	Total	22958.071	124			

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

Hasil uji simultan pada tabel 7 menunjukkan nilai F hitung sebesar 18,141 dengan sig $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel kompetisi politik (political competition) dan kekuatan politik (political strength) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi transparansi keuangan daerah.

Uji Parsial (T-Test)

Berdasarkan tabel 8 dibawah ini diperoleh bahwa variabel kompetisi politik (political competition) memiliki nilai t hitung $-1,397 < t$ tabel $1,657$ atau nilai signifikansi $0,165 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel kompetisi politik bernilai negatif yaitu $-11,110$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi politik (X1) tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) **ditolak**. Hasil pengujian variabel kekuatan politik (Political Strength) yaitu $t_{hitung} -5,977 > 1,657$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel kekuatan politik bernilai negatif yaitu $-13,979$. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	30.341	4.556		6.660	0.000
Political Competition (X1)	-11.110	7.950	-0.112	-1.397	0.165
Political Strength (X2)	-13.979	2.339	-0.478	-5.977	0.000

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023)

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetisi Politik (Political Competition) Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pada kabupaten/kota Pulau Sumatra tahun anggaran 2021, ditemukan bahwa hipotesis (H1) ditolak. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial pada tabel 8, yang menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar -11,110 dan nilai signifikan dari variabel kompetisi politik (Political Competition) lebih besar dari 0,05 yaitu $0,165 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetisi politik negatif namun tidak signifikan mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Garcia & Garcia (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan website Pemda di Spanyol, yang membuktikan empiris dan menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemda. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan Araujo & Tejedro Romero (2016) yang menemukan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Temuan Araujo & Tejedro Romero (2016) menegaskan bahwa persaingan politik dapat berfungsi sebagai insentif untuk menunjukkan kinerja dan manajemen yang baik dari kandidat yang berkuasa dan menurut teori agensi petahana sebagai agen telah menanggapi kepentingan prinsipal (masyarakat). Penelitian (Tavares & da Cruz, 2020; Alcaide Munos et al., 2018; Trisnawati & Achmad 2014) juga menemukan pengaruh positif kompetisi politik terhadap transparansi keuangan daerah.

Peneliti sepakat dengan penelitian yang dilakukan Garcia & Garcia (2010), Araujo & Tejedro (2016) dan Tavares & da Cruz (2020), namun hasil penelitian ini tidak bisa membuktikan bahwa kompetisi politik dapat mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kompetisi politik tidak menjamin kepala daerah termotivasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hipotesis dalam penelitian ini ditolak, pertama derajat persaingan politik antara pimpinan daerah kab/kota Pulau Sumatra dengan lawan politiknya masih rendah. Ketika kompetisi politik rendah atau terdapat kekuatan yang dominan, politisi cenderung merasa aman dengan posisinya sehingga merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Sebaliknya Persaingan politik ketat atau tinggi adalah bentuk pengawasan atas pemerintah yang dipilih secara demokrasi. Dengan adanya pengawasan dari lawan politik, pemerintah daerah yang memiliki persaingan politik yang tinggi atau ketat akan termotivasi untuk melaporkan informasi tentang pelaksanaan pemerintah. Faktor selanjutnya adalah variabel kompetisi politik dalam penelitian Araujo & Tejedro Romero (2016) dihitung dengan selisih antara persentase suara yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menempati posisi pertama dan kedua. Sedangkan dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah 1- persentase kemenangan kepala daerah (Rahim & Martani, 2016). Proksi pengukuran tidak sama karena perbedaan kultur politik dan sistem pemerintahan pada masing-masing negara yang menjadi objek penelitian, yaitu Indonesia dan Spanyol. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga tidak diperoleh hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tejedro-Romero & Araujo (2020) di kotamadya Portugis dan penelitian (Wau & Ratmono 2015; Rahim & Martani 2016) di Indonesia bahwa tidak di ditemukan bukti empiris kompetisi politik berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah. Kepala daerah yang diwakili oleh bupati/walikota yang terpilih berperan sebagai penerima wewenang (agen) dari masyarakat (prinsipal) seharusnya

termotivasi dalam mengungkapkan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada prinsipal yang telah memilihnya sebagai bentuk akuntabilitas.

Pengaruh Kekuatan Politik Terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra tahun anggaran 2021, ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan politik mayoritas berpengaruh negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian dapat dilihat dari hasil tabel 8, yang menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel kekuatan politik (Political Strength) lebih kecil dari Alpha 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel} -5,977 > 1,657$ dengan koefisien β dari variabel kekuatan politik bernilai negatif yaitu -13,979. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kekuatan politik (political strength) terhadap transparansi adalah negatif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tejedro & de Araujo (2015) tentang *Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data* yang menunjukkan kekuatan politik mayoritas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan. Hasil penelitian Tejedro & de Araujo (2015) menyimpulkan bahwa posisi mayoritas memberi kekuatan kepada pemerintah dalam memutuskan kapan dan informasi mana yang akan diungkapkan sehingga tidak memerlukan dukungan dari pihak lain.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Albalate (2013) yang menyatakan kekuatan mayoritas berpengaruh negatif terhadap transparansi. Posisi mayoritas menjadikan pemerintah daerah dapat menyepelkan fungsi transparansi pelaporan keuangannya, dikarenakan pemerintah daerah tersebut berada di dalam lingkungan yang mendukungnya. Camaano-Alegre (2013) juga menemukan kekuatan mayoritas berpengaruh negatif, kekuatan politik yang lebih kuat dan legitimasi yang tinggi berdampak kepada penurunan praktek transparansi keuangan pemerintah daerah. Namun berlawanan dengan hasil yang didapati oleh Tejedro-Romero & de Araujo (2020) yang menemukan bahwa kekuatan politik tidak berpengaruh terhadap transparansi.

Peneliti sepakat dengan penelitian (Tejedro-Romero & de Araujo, 2015; Albalate, 2013; Caamano-Alegre 2013) dan peneliti ini juga membuktikan bahwa kekuatan mayoritas mampu mempengaruhi transparansi keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepala daerah yang didukung kekuatan mayoritas akan berdampak pada penurunan pengungkapan informasi keuangan. Faktor yang mendukung hipotesis ini diterima pertama, karena hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dimana saat adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen maka agen akan bertindak lebih oportunistik demi kepentingannya. Selain itu pemerintah daerah kabupaten/kota berada di kekuatan mayoritas memiliki kontrol yang lengkap atas keputusan politik dan informasi sehingga tidak memerlukan kesepakatan dengan pihak lain. Hal ini berbeda dengan kepala daerah yang memiliki kekuatan fragmentasi yang menghadapi lebih banyak situasi keterampilan negosiasi, selain itu kemampuan untuk berkompromi diperlukan dalam menyakinkan anggota politik lain dalam mendukung kebijakan yang diusulkan oleh walikota.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hipotesis pertama yaitu persaingan politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera tahun 2021 ditolak berdasarkan temuan kajian dan uraian pembahasan. Hipotesis kedua diterima, dan

menyatakan bahwa pada tahun 2021, kabupaten dan kota di Pulau Sumatera akan mengalami penurunan besar dalam keterbukaan pengelolaan keuangan daerahnya karena kekuatan politik.

Keterbatasan

Penelitian ini mengandung keterbatasan yang dapat digunakan penelitian lain sebagai panduan untuk memperbaiki temuan mereka. Berikut ini adalah kekurangan penelitian tersebut:

1. Beberapa *website* pemda telah menyediakan menu dan submenu konten transparansi anggaran, namun didalamnya hanya terdapat beberapa dokumen saja bahkan ada yang tidak sama sekali dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah yang terupload.
2. Beberapa *website* pemda tidak mencantumkan tanggal upload ataupun tanggal penetapan sebuah dokumen sehingga menyulitkan peneliti dalam menilai salah satu kriteria dokumen yang dijadikan indikator penilaian yaitu ketepatan waktu.
3. Peneliti ini hanya menggunakan data dalam transparansi pengelolaan anggaran daerah tahun 2021, sehingga kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Saran

1. Bagi pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas Inpres no 7 Tahun 2015, merumuskan kebijakan serta pembinaan terkait peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Membentuk badan komisi informasi yang berwenang sebagai monitoring dan evaluasi transparansi kab/kota sehingga dapat diperoleh informasi perkembangan transparansi kab/kota setiap periode dan menciptakan sanksi yang jelas, tegas yang dapat memberikan efek jera kepada kab/kota yang belum memenuhi persyaratan transparan.
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum sama sekali mempublikasikan dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah hendaknya untuk segera mempublikasikan seluruh dokumen-dokumen tersebut secara lengkap ke dalam *websitenya* masing-masing atau minimal 12 dokumen/indikator yang ditetapkan dalam Inpres No. 7 Tahun 2015 karena inpres tersebut merupakan syarat minimal transparan. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut diharapkan tidak hanya dipublikasikan dalam satu waktu tapi juga dipublikasikan secara tepat waktu dan konsisten setiap tahun atau per periode anggaran.
4. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah mempublikasikan baik seluruh maupun sebagian dari 12 dokumen tersebut hendaknya untuk mencantumkan tanggal upload ataupun tanggal penetapan sebuah dokumen tersebut, karena salah satu kriteria dokumen yang dijadikan indikator penilaian adalah ketepatan waktu.
5. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat menggunakan haknya untuk mengakses informasi publik sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan atas APBD serta memastikan bahwa anggaran telah dialokasikan dan dilaksanakan secara efisien, efektif, dan tepat waktu.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam beberapa tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Albalate D. (2013). The institutional, economic and social determinants of local government transparency. *Journal of Economic Policy Reform*, 16, 90-107
- Alcaida Munoz, L., Rodriguez Bolivar, M.P., & Lopez Hernandez, A. M. (2017). Transparency in governments: a meta-analytic review of incentives for digital versus hard-copy public financial disclosures. *The American Review of Public Administration*, 47(5), 550-573

- Alcáida Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M.P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in governments: a meta-analytic review of incentives for digital versus hard-copy public financial disclosures. *The American Review of Public Administration*, 47(5), 550-573
- Anisa, M. (2021). *Analisis Pengaruh Tingkat Maturitas Pemerintahan Elektronik dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Berbasis Website Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedó-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327–347. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>.
- Caamaño-Alegre, J., Lago-Peñas, S., Reyes-Santías, F., & Santiago-Boubeta, A. (2013). Budget transparency in local governments: an empirical analysis. *Local government studies*, 39(2), 182-207.
- Citro, F., Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Explaining budget transparency through political factors. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 115-134.
- Cuadrado-Ballesteros, B., Frías-Aceituno, J., & Martínez-Ferrero, J. (2014). The role of media pressure on the disclosure of sustainability information by local governments. *Online Information Review*, 38(1), 114–135.
- Databoks(2022).<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/sumatera-selatan-provinsi-dengan-korupsi-terbayak-pada-2021>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 147–160.
- García, A. C., & García-García, J. (2020). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. *Local governments studies*, 36(5), 679-695
- Guillamón, M. D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The determinants of local government's financial transparency. *Local Government Studies*, 37(4), 391- 406.
- Guillamón, M. D., Ríos, A. M., & Vicente, C. (2011). Transparencia financiera de los municipios españoles. Utilidad y factores relacionados [Financial transparency of the Spanish municipalities. Utility and related factors]. *Auditoría Pública*, 11(55), 109-116.
- Huwae, K. (2016). *Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (Studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation Universitas Gadjah Mada).
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah. In *Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 19, pp. 1-79)
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2012. Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

- Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110.
- Sutaryo, S., & Amanu, K. T. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43-60.
- Tavares, A. F., & da cruz, N. F. (2020). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 37 (3), 101249
- Tejedo-Romero, F., & Araujo, J. F. F. E. (2020). E-government-enabled transparency: The effect of electoral aspects and citizen's access to Internet on information disclosure. *Journal of Information Technology & Politics*, 17(3), 268-290.
- Tejedo-Romero, F., & de Araujo, J. F. F. E. (2015). Determinants of local governments' transparency in times of crisis: evidence from municipality level panel data. *Administration & society*, 50(4), 527-554.
- Tempo.co.(2022).<https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-ddari-180-negara>